

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN WAJIB KONVERGENSI *IFRS* PADA LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (STUDI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG *LISTING* PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2014)**

Nurin Nandhi Fatin<sup>1</sup>

*Abstract: The Effect of the Corporate Governance Structure on Disclosure of the IFRS Convergency Components in Comprehensive Profit and Comprehensive Statements (Study on Banking Companies Listed on Indonesia Stock Exchange 2013-2014). This study aims to analyze the level of compliance with mandatory disclosure IFRS at statement of comprehensive income in bank companies. Structure of corporate governance measured by the number of commissioners, the proportion of independent commissioners, the number of commissioners meetings, the number of audit committee members, the number of audit committee meetings, and competition audit committee. The level of IFRS mandatory at statement of comprehensive income is measured based on identified items of BAPEPAM Regulation Number VII.G.7. Under purposive sampling, secondary data of 40 annual report year 2013-2014 of in Indonesia Stock Exchange are selected. The multiple regression test showed that structure of corporate governance effects the level of compliance with mandatory disclosure convergences of IFRS. These result indicate that the level of compliance with mandatory disclosure convergence of IFRS at statement of comprehensive income in the bank companies is 55,8%. Corporate governance structure variables that effect compliance is the number of commissioners, the number of audit committee members, and competition audit committee. Other variables, namely the proportion of independent commissioners, the number of commissioners meetings, and the number of audit committee meetings had no effect on the level compliance with mandatory disclosure convergence of IFRS at statement of comprehensive income.*

**Abstrak: Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Wajib Konvergensi *IFRS* pada Laporan Laba Rugi Komprehensif (Studi pada Perusahaan Perbankan yang *Listing* pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014).** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi *IFRS* pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan perbankan. Struktur *corpoarte governance* yang digunakan adalah jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit dan kompetensi komite audit. Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi *IFRS* pada laporan laba rugi komprehensif menggunakan identifikasi item berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM No.VII.G7. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dan memperoleh data 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2014. Dari hasil uji regresi linear berganda memperlihatkan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap pengungkapan wajib. Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi *IFRS* pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan perbankan sebesar 55,8%. Struktur *corporate governance* mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib adalah jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit dan kompetensi komite audit sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh pada

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus, email: chilmaskeptis@gmail.com

tingkat pengungkapan wajib yaitu proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris dan jumlah rapat anggota komite audit.

**Kata Kunci:** *corporate governance*, pengungkapan wajib, dan perusahaan bank.

## PENDAHULUAN

Saat ini harmonisasi standar akuntansi internasional menjadi isu hangat karena berhubungan erat dengan globalisasi dalam dunia bisnis yang terjadi saat ini. Globalisasi bisnis tampak dari kegiatan perdagangan antar negara yang mengakibatkan munculnya perusahaan multinasional. Hal ini mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia (Gamayuni, 2009). Di negara Indonesia yang telah tergabung dalam *The Group of Twenty* (G20 Forum) telah menyetujui untuk melakukan konvergensi IFRS, bahkan IAI telah mencanangkan di tahun 2012 pemerintah Indonesia telah melakukan adopsi IFRS secara penuh (Utami, dkk, 2012). Adopsi IFRS merupakan alternatif yang paling murah untuk meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan untuk mendukung alokasi modal yang efisien serta untuk menarik minat para investor agar membiayai pertumbuhan ekonominya (Silviana, 2013).

Penerapan standar akuntansi berbasis IFRS belum dapat menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem institusional yaitu *corporate governance* untuk mengawasi kinerja manajemen dalam perusahaan. Pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan harus dilakukan oleh suatu perusahaan karena struktur *corporate governance* disetiap negara berbeda-beda (Pitasari, dkk, 2014). *Corporate governance* menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat seringnya terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham atau komisaris dan para direktur dalam pengambilan keputusan. *Corporate governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan (Hamzah dan Suparjan, 2009).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang hasilnya tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Penelitian ini mereplikasi penelitian Hafiz M dkk, (2015). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama adanya penambahan variabel independen baru dalam penelitian ini, yaitu variabel kompetensi komite audit, karena kompetensi komite audit merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Kompetensi komite audit merupakan keahlian keuangan yang di definisikan sebagai kemampuan untuk membaca dan memahami laporan keuangan (Supriyono, dkk, 2014). Kedua, penelitian sebelumnya diteliti tahun 2012-2013 dan sekarang tahun penelitian yang dilakukan pada tahun 2013-2014. Ketiga, penelitian ini menggunakan sampel dari jenis perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) menguraikan bahwa pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan sangat rentan terhadap masalah yang disebut sebagai masalah keagenan (*agency problem*). Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut agen) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. data historis pada perusahaan yang menggunakan dua metode tersebut.

Menurut *Forum for corporate governance in Indonesia* (FCGI, 2001) dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi

perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Menurut Komisi Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance*.

Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Prawinandi 2014). Keberadaan komisaris independen telah diatur dalam Kep-305/BEJ/072004 yang mengatur agar perusahaan yang *listing* dibursa memunyai komisaris independen minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris. *Forum for corporate governance in Indonesia* (FCGI, 2001) menerangkan bahwa kriteria komisaris independen di Indonesia diambil dari kriteria otorisasi bursa efek Australia tentang *outside directors*, dimana kriteria tersebut menekankan tentang pentingnya independensi dalam dewan komisaris.

Dalam pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG tahun 2006, mengungkapkan bahwa Dewan Komisaris bertanggungjawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya perusahaan pada umumnya. Analisis Pelaksanaan dan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik (BAPEPAM-LK, 2010) menerangkan bahwa rapat dewan komisaris diselenggarakan minimal satu kali dalam satu bulan. Dalam hal ini kinerja yang dilakukan oleh dewan komisaris akan dapat dilihat efektivitasnya melalui kehadiran anggota dewan komisaris dalam rapat yang secara rutin diadakan.

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk meningkatkan pengendalian dalam perusahaan (Supriyono,dkk, 2014). *Forum for corporate governance in Indonesia*(FCGI, 2001) agar semua fungsi dapat berjalan dengan baik dalam lingkungan bisnis yang kompleks, maka dewan komisaris perlu membentuk komite-komite yang membantunya menjalankan tugas, salah satunya adalah komite audit Berdasarkan Peraturan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 disebutkan bahwa komite audit terdiri dari sekurang- kurangnya satu orang komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 orang lainnya berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik

Rapat komite audit merupakan koordinasi antara anggota-anggotanya agar dapat menjalankan tugas secara efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pelaksanaan *good corporate governance* perusahaan (Pitasari, 2014). *Forum for corporate governance in Indonesia* (FCGI, 2001) menerangkan bahwa komite audit dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang menyangkut sistem pelaporan keuangan perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam setahun.

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut sistem pelaporan keuangan peraturan keputusan ketua bapepam nomor: Kep-643/BL/2012 menyebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir.

Kompetensi merupakan profesional yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi dan auditing. Peningkatan Kompetensi internal auditor secara signifikan dilakukan melalui program sertifikasi profesi, baik sertifikasi tingkat nasional maupun internasional Destiana (2014).

Selain itu menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Nomor: PER-211/K/JF/2010 tentang standar kompetensi auditor bahwa, kompetensi auditor adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan,

keterampilan/keahlian, dan sikap perilaku untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik.

Jumlah anggota dewan komisaris memiliki fungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi atas kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Semakin tinggi jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola perusahaan serta melaksanakan akuntabilitas juga akan semakin baik (Hafiz M dkk, 2015). Jadi perusahaan akan cenderung lebih melakukan kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesis yang dikembangkan adalah: **H1**: Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

Proporsi Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Proporsi komisaris independen dapat memastikan transparansi, struktur yang sehat dan pengambilan keputusan yang rasional (Utami, dkk, 2012). Semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam perusahaan maka pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja *agents* (manajemen) suatu perusahaan dengan menuntut adanya transparansi dalam laporan keuangan juga akan semakin baik (Supriyono dkk, 2014). Jadi perusahaan akan cenderung lebih melakukan kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesis yang dikembangkan adalah: **H2**: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

Jumlah Rapat Dewan Komisaris Supriyono dkk, (2014) menjelaskan bahwa peran utama dewan komisaris yaitu memonitoring keputusan manajemen. Kinerja dan tugas dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan akan efektif hadir dalam rapat dewan komisaris. Rapat dewan komisaris akan menghasilkan nasehat dan kebijakan bagi direksi dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi intensitas rapat dewan komisaris dilakukan maka semakin tinggi pula pemantauan atas kinerja manajemen untuk melakukan pengungkapan secara luas dalam laporan keuangan. Jadi perusahaan cenderung melakukan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesis yang dikembangkan adalah: **H3**: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

Jumlah Anggota Komite Audit Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk meningkatkan pengendalian dalam perusahaan. Selain sebagai pembantu dalam pengawasan komite audit akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan, keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga pengungkapan dalam *annual report* akan diperluas sesuai dengan aktivitas perusahaan (Surpriyono, dkk, 2014). Semakin tinggi jumlah anggota komite audit maka pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan secara lengkap dan jelas juga akan semakin baik. Jadi perusahaan akan cenderung lebih melakukan kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesis yang dikembangkan adalah: **H4**: Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

Jumlah Rapat Komite Audit Supriyono dkk, (2014) menjelaskan bahwa komite audit dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang menyangkut sistem pelaporan keuangan, perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam setahun. Semakin tinggi intensitas rapat komite audit dilakukan maka semakin tinggi pula transparansi pelaporan keuangan. Jadi perusahaan cenderung melakukan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesis yang dikembangkan adalah: **H5**: Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

Kompetensi Komite Audit Annisa dkk, (2013) mendefinisikan kompetensi komite audit adalah orang yang berkompeten dalam pekerjaan atau profesi yang dianggap memiliki suatu keterampilan, pengetahuan dan pemahaman yang diterapkan dalam suatu organisasi. Pengetahuan tentang keuangan merupakan salah satu karakteristik kompetensi yang penting yang harus dimiliki oleh anggota komite audit, karena pengetahuan tentang keuangan dapat memberikan dasar yang baik bagi komite audit untuk mengkaji dan menganalisis informasi keuangan. Semakin tinggi keahlian yang dimiliki komite audit maka semakin tinggi pula pengungkapan wajib yang dilakukan. Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesis yang dikembangkan adalah: **H6**: Kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

## METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013- 2014. Pengungkapan Wajib: Merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Hafiz M, dkk, 2015).

MANDSCRBY= Pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan B pada tahun Y

SCRBY = Jumlah item yang diungkapkan perusahaan B pada tahun Y

MAXBY= Nilai maksimum yang dapat dicapai perusahaan B pada tahun Y

Jumlah Anggota Dewan Komisaris: Jumlah anggota dewan komisaris diukur dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris dari pihak yang terafiliasi (memiliki hubungan, salah satunya pihak internal perusahaan) dan tidak terafiliasi (tidak memiliki hubungan) dengan perusahaan (Hafiz M, dkk, 2015).

Proporsi Komisaris Independen : Indikator proporsi komisaris independen yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhardajanto dkk, (2012), yaitu menggunakan proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

Jumlah Rapat Dewan Komisaris :Dewan komisaris mengadakan pertemuan setidaknya satu kali dalam setiap bulan. Penelitian ini menggunakan indikator untuk mengukur jumlah rapat dewan komisaris sesuai dengan penelitian Supriyono dkk, (2014) yaitu jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam satu tahun.

Jumlah Anggota Komite Audit : Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) menjelaskan bahwa jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian ini indikator untuk mengukur jumlah anggota komite audit sesuai dengan penelitian Prawinandi dkk, (2012) yaitu jumlah anggota komite audit dalam perusahaan.

Jumlah Rapat Komite Audit : Pertemuan audit adalah tempat bagi direksi untuk membahas proses pelaporan keuangan dan itu merupakan tempat dimana proses pengawasan keuangan terjadi (Pitasari, 2014). Rapat Komite Audit adalah rapat secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan (Bapepam, Kep-643/BL/2012). Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur jumlah rapat komite audit yang digunakan sesuai dengan penelitian Utami dkk, (2012), yaitu jumlah rapat komite audit yang dilaksanakan dalam satu tahun.

Kompetensi Komite Audit : Kompetensi Komite Audit dapat ditunjukkan dengan keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan (Supriyono, 2014). Pada penelitian ini kompetensi diukur dari persentase anggota komite audit yang ahli dalam akuntansi dan atau keuangan. Ukuran ini juga telah digunakan dalam penelitian Supriyono dkk, (2014).

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah model analisis regresi sederhana dan berganda. Persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha_0 + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + bX_5 + bX_6$$

Notasi :

Y = Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

$\alpha_0$  = Konstanta

X1 = Jumlah Anggota Dewan Komisaris

X2 = Proporsi Komisaris Independen

X3 = Jumlah Anggota Komite Audit

X4 = Jumlah Rapat Dewan Komisaris

X5 = Jumlah Rapat Komite Audit

X6 = Kompetensi Komite Audit

e = eror

## ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan wajib konvergensi IFRS sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit dan kompetensi komite audit dengan signifikansi sebesar 5%. Hasil pengolahan regresi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.  
Hasil Pengolahan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Const)	,558	,061			9,133	,000
JADK	,011	,005	,502		2,364	,024
PKI	,069	,067	,183		1,025	,313
JRDK	,000	,000	,096		,602	,551
JAKA	,014	,005	,439		3,014	,005
JRKA	,000	,001	,072		,490	,627
KKA	,166	,038	,783		4,317	,000

Sumber : data sekunder yang diolah spss 22 (2016)

Hasil dari pengujian hipotesis atas pengaruh masing-masing variabel adalah sebagai berikut : Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Wajib Diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari variabel jumlah anggota dewan komisaris sebesar 0,011 dan memiliki nilai probabilitas (sig) lebih besar dari nilai  $\alpha$  ( $0,011 < 0,05$ ), sehingga variable jumlah anggota dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan wajib dengan arah koefisien yang positif. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_1$ )

yang menyatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib diterima.

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Wajib. Diketahui nilai koefisien regresi dari variabel proporsi komisaris independen sebesar 0,069 dan memiliki nilai probabilitas (sig) lebih besar dari nilai  $\alpha$  ( $0,0313 > 0,05$ , sehingga variabel proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan wajib dengan arah koefisien yang negatif. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib ditolak.

Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Wajib Diketahui nilai koefisien regresi variabel jumlah rapat dewan komisaris sebesar 0,000 dan memiliki nilai probabilitas (sig) lebih besar dari nilai  $\alpha$  ( $0,551 > 0,05$ , sehingga variabel jumlah rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan wajib dengan arah koefisien yang negatif. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib ditolak.

Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Pengungkapan Wajib. Diketahui nilai koefisien regresi variabel jumlah anggota komite audit sebesar 0,014 dan memiliki nilai probabilitas (sig) lebih besar dari nilai  $\alpha$  ( $0,005 < 0,05$ , sehingga variabel jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan wajib dengan arah koefisien yang positif. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib diterima.

Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Wajib. Diketahui nilai koefisien regresi variabel jumlah anggota komite audit sebesar 0,000 dan memiliki nilai probabilitas (sig) lebih besar dari nilai  $\alpha$  ( $0,627 > 0,05$ , sehingga variabel jumlah rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan wajib dengan arah koefisien yang negatif. Dengan demikian hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dkomite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib ditolak.

Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Pengungkapan Wajib. Diketahui nilai koefisien regresi variabel kompetensi komite audit sebesar 0,1666 dan memiliki nilai probabilitas (sig) lebih besar dari nilai  $\alpha$  ( $0,000 < 0,05$ , sehingga variabel kompetensi komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan wajib dengan arah koefisien yang positif. Dengan demikian hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib diterima.

Jumlah Anggota Dewan Komisaris Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) diketahui bahwa nilai sig. ( $0,024 < \alpha$  ( $0,05$ ) yang artinya menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan maka semakin tinggi pula pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Hafiz M dkk, (2015) dan Supriyono dkk, (2014) yang menyatakan bahwa jumlah anggotadewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Namun berlawanan dengan hasil penelitian Prawinandi dkk, (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Proporsi Komisaris Independen Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) diketahui bahwa nilai sig. ( $0,313 > \alpha$  ( $0,05$ ) yang artinya menunjukkan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya proporsi komisaris independen

dalam perusahaan maka semakin rendah pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Utami dkk, (2012) dan Supriyono dkk, (2014) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Namun berlawanan dengan hasil penelitian Prawinandi dkk, (2012) dan Hafiz M dkk, (2015) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Jumlah Rapat Dewan Komisaris. Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diketahui bahwa nilai sig. (0,551) >  $\alpha$  (0,05) yang artinya menunjukkan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas rapat dewan komisaris dalam perusahaan maka semakin rendah pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Hafiz M dkk, (2015) dan Supriyono dkk, (2014) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Namun berlawanan dengan hasil penelitian Suhardjanto dkk, (2012) dan Suhardjanto dan Dewi (2011) menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Jumlah Anggota Komite Audit Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat ( $H_4$ ) diketahui bahwa nilai sig. (0,005) <  $\alpha$  (0,05) yang artinya menunjukkan jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit dalam perusahaan maka semakin tinggi pula pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Prawinandi dkk, (2012) dan Supriyono dkk, (2014) yang menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Namun berlawanan dengan hasil penelitian Hafiz M dkk, (2015) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Jumlah Rapat Komite Audit Berdasarkan hasil uji hipotesis kelima ( $H_5$ ) diketahui bahwa nilai sig. (0,627) >  $\alpha$  (0,05) yang artinya menunjukkan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas rapat komite audit dalam perusahaan maka semakin rendah pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Hafiz M dkk, (2015) dan Utami dkk, (2012) yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Namun berlawanan dengan hasil penelitian Supriyono dkk, (2014) menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Kompetensi Komite Audit Berdasarkan hasil uji hipotesis keenam ( $H_6$ ) diketahui bahwa nilai sig. (0,000) <  $\alpha$  (0,05) yang artinya menunjukkan kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi komite audit dalam perusahaan maka semakin tinggi pula pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Mutmainnah dan Ratna (2013) dan Annisa dkk, (2013) yang menyatakan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Namun berlawanan dengan hasil penelitian Supriyono dkk, (2014) dan Annisa dkk, (2013) menunjukkan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit dan kompetensi komite audit terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS, maka dapat diambil kesimpulan berikut : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Berdasarkan teori keagenan dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian internal yang bertanggungjawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Komisaris bertanggungjawab atas pengawasan perseroan dan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, dengan jumlah dewan komisaris yang

besar akan memudahkan untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan manajemen sehingga akan meningkatkan perluasan pengungkapan wajib. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Berdasarkan teori agensi komisaris independen memiliki fungsi pengawasan atas kinerja manajemen, namun pengangkatan komisaris independen hanya untuk memenuhi peraturan dan ketentuan formal pemerintah saja. Sepertidiketahui dalam Kep-305/BEJ/072004 disebutkan bahwa perusahaan harus memiliki komposisi dari keseluruhan dewan komisaris independen minimal 30% dari total anggota dewan komisaris sehingga pengawasan atas kinerja manajemen kurang begitu aktif dan tidak mampu menekan manajemen untuk melakukan perluasan pengungkapan wajib. Jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Berdasarkan teori keagenan menjelaskan bahwa rapat dewan komisaris dapat mencerminkan efektivitas kinerja dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, namun jumlah rapat dewan komisaris dalam perusahaan hanya bersifat *mandatory* terhadap peraturan yang ada, dimana dalam peraturan keputusan ketua Bapepam Nomor: Kep-643/BL/2012 disebutkan bahwa dewan komisaris dan direksi mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan. Jadi jumlah rapat anggota dewan komisaris belum mampu menekan manajemen untuk melakukan perluasan pengungkapan wajib. Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Menurut teori agensi komite audit berperan mengawasi manajemen agar mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap dan jelas. keberadaan komite audit dalam perusahaan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga pengungkapan wajib mampu diperluas sesuai dengan aktivitas perusahaan. Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Menurut teori agensi peranan dari rapat komite audit diharapkan mampu menjaga kualitas serta kinerja atas komite audit, namun jumlah rapat anggota komite audit hanya bersifat *mandatory* terhadap peraturan yang ada, dimana dalam keputusan ketua Bapepam Nomor: Kep-643/BL/2012 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan. Jadi jumlah rapat komite audi belum mampu menekan manajemen untuk melakukan perluasan pengungkapan wajib. Kompetensi anggota komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Berdasarkan teori keagenan kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit berperan penting untuk menilai, mengkaji dan menganalisis informasi keuangan guna untuk menghindari konflik diantara pihak yang berkepentingan. Dengan kompetensi yang dimiliki oleh komite audit semakin besar akan memudahkan untuk menilai, mengkaji dan menganalisis informasi keuangan sehingga akan meningkatkan perluasan pengungkapan wajib.

#### Keterbatasan Penelitian

Setelah melakukan analisis data dan implementasi hasil, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain : Pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat hanya 32,2%, sehingga masih ada 67,8% pengaruh variabel bebas yang lain yang tidak diteliti. Dalam penelitian ini rapat dewan komisaris dan rapat komite audit menggunakan indikator jumlah rapat yang dilakukan dalam satu tahun. Hal ini memiliki kelemahan karena setelah dilakukan pengolahan data ditemukan bahwa rata-rata setiap perusahaan memiliki jumlah rapat yang hampir sama. Artinya dengan menggunakan jumlah rapat dewan komisaris maupun komite audit belum dapat menjelaskan secara maksimal *corporate governance* itu sendiri

#### Saran

Mengingat penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, maka peneliti mengajukan saran perbaikan bagi para peneliti selanjutnya, yaitu : Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk penambahan variabel bebas yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib seperti: proporsi komite audit independen karena anggota komite audit yang independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, termasuk dalam pengungkapan informasi (Suhardjanto dkk, 2012). Peneliti selanjutnya diharapkan agar menggunakan indikator lain yaitu jumlah rapat diabgai dengan jumlah rapat terbanyak dengan skala pengukuran interval. karena indikator ini dapat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja anggota sehingga mampu memperluas pengungkapan wajib (Prihartaningtyas, 2015).

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Ferra Syarifah., Rita Anugrah., Poppy Nurmayanti. (2013). *Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Pengawasan Bank*. Jurnal SOROT. Vol 8 No. 1 April: Hal 1-104. Lembaga Penelitian Universitas Riau.
- Alvionita, Intan dan Salma Taqwa. (2015). *Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure*. Jurnal SNEMA Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2004). *Keputusan Ketua*.
- Bapepam Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang *Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas*. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2004 *Keputusan Ketua*.
- Bapepam Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-KEP-29/PM/2004 tentang *Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2006). *Keputusan Ketua Bapepam Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik.*
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2012). *Keputusan Ketua Bapepam Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2012). *Keputusan Ketua Bapepam Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-SE/17/BL/2012 tentang Penggunaan Checklist Pengungkapan Laporan Keuangan untuk Seluruh Industri di Pasar Modal di Indonesia*.
- Brigham, Eugene F dan Joel F. Huston. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* Jakarta : Salemba Empat. Cahyonowati, Nur dan Dwi Ratmono. 2012. *Adopsi IFRA dan Relevansi Nilai Informasi Akuntansi*. Jurnal Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro.
- Cety T. dan D. Suhardjanto. (2010). *Pengaruh Corporate Terhadap Environmental Performance di Indonesia*. Call For Paper Universitas Sebelas Maret Surakarta. 15 Juni 2016.
- Eliza, A. (2012). *Tinjauan atas PSAK No.1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan dan Perbedaannya dengan PSAK No.1 (Revisi 1998)*. Jurnal ilmiah ESAI Vol 6 No 2:1-8.
- Fauziah,Isna. (2015). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Pasca Konvergensi IFRS*. Jurnal Bisnis dan Manajemen.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). (2001). *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*.

- Gamayuni, R. R. (2009). *Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju International Financial Reporting Standards*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan 14 (2):153-166.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan SPAA Cetakan keempat*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hafiz M, Rizky M. Ade Andriyani dan Chairina. (2015). *Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komperhensif*. Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan.
- Hamzah, M Zilal., dan Suparjan A. (2009). *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Struktur Modal*. Media Riset Akuntansi Auditing Vol 9 No 1: 1-18.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 2012*. Salemba Empat : Jakarta.
- Imam, Annisarah. (2012). *Analisis Survei Penerapan SAK IFRS untuk PSAK No 1 dan No 2 : Studi empiris pada perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI tahun 2010 dan 2011*.
- Jensen, Michael C. Dan Mackling W. (1979). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, (Jurnal). *Journal of Financial Economics*. Vol 3: Hal 305-306.
- Kartikahadi, Hans, Rosita Uli Sinaga, Merliyana Syamsul, Sylvia Veronica Siregar. (2012). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Jakarta: Salemba Empat.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance*.
- Martani, Dwi., Sylvia VNPS., Ratna Wardani., Aria Farahmita., Edward T. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mutmainnah, Nurul dan Ratna Wardani. (2013). *Analisis Dampak Kualitas Komite Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Volume 10 No 2, Desember 2013. Universitas Indonesia.
- Pitasari, Anggita. (2014). *Analisis Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS Pada Laporan Laba Rugi Komperhensif : Studi Empiris pada Perusahaan Jasa yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Prawinandi, W., D. Suhardjanto dan H. Triatmoko. (2012). *Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar:1-26.
- Pratiwi, E., R. Indriani dan P. P. Midiastuty. (2012). *“Relevansi Nilai Laporan Keuangan dan Komponen Laba Rugi Komperhensif dalam Menjelaskan Harga dan Return Saham”*. Forum Bisnis & Keuangan I:289-307.

- Prihartantiningtyas, Noviana. (2015). *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Frekuensi Rapat Komite Audit*. Skripsi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods For Busniess: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. Silviana, Yohana HK. 2013. *Perbedaan Tingkat Pengungkapan Antara Perusahaan. Asing dan Domestik Dengan Adanya Konfergensi IFRS*. Jurnal Akuntansi Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
- Suhardjanto, D., A. Dewi., Erna R., dan Firazonia M. (2012). *Pengaruh Corporate Governance dalam Praktik Risk Disclosure di Indonesia*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15(1): 105-118.
- Suhardjanto, D., Edi Supriyono dan Akhmad Abdul Mustaqim. (2014). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok: 1-26.
- Sutedi, Ardian. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Utami, Suhardjanto, dan Hartoko. (2012). *Investigasi dalam Konvergensi IFRS di Indonesia : Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib dan Kaitannya dengan mekanisme Corporate Governance*. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar: 1-26.